

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renja tahunan sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga Program dan Kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

1.1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Surabaya akan mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 227, telah mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima 5 (lima) tahun.

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah “Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat” Keluarga yang berkualitas menurut UU No. 52 tahun 2000 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang berdaya adalah keluarga yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada orang lain. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup dan modal sosial yang positif. Keluarga berdaya adalah masyarakat yang menyadari arti penting pendidikan, nilai hidup sehat, kepatuhan terhadap hukum, keharusan untuk terus bekerja atau berwirausaha serta menjaga kelestarian lingkungan. Keluarga berdaya adalah keluarga yang memahami kegunaan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga yang bahagia. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja Tahun 2020. Selanjutnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Surabaya digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, aktivitas selanjutnya yaitu penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah serta menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah terdiri dari analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dengan sistematika minimal sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaannya mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bappeko untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dan disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bappeko melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Bappeko menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Maka Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah. kemudian Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko untuk diverifikasi kembali paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeko.

Setelah Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeko. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Tahap selanjutnya adalah Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematisa rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahap terakhir penyusunan Renja adalah Penetapan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Verifikasi juga bertujuan untuk menemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeko menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeko, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, setelah disempurnakan rancangan akhir Renja disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeko. Kemudian dilakukan Verifikasi seluruh rancangan

akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Bappeko menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2016-2021, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kota Surabaya periode 2016-2021. RPJMD merupakan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020.

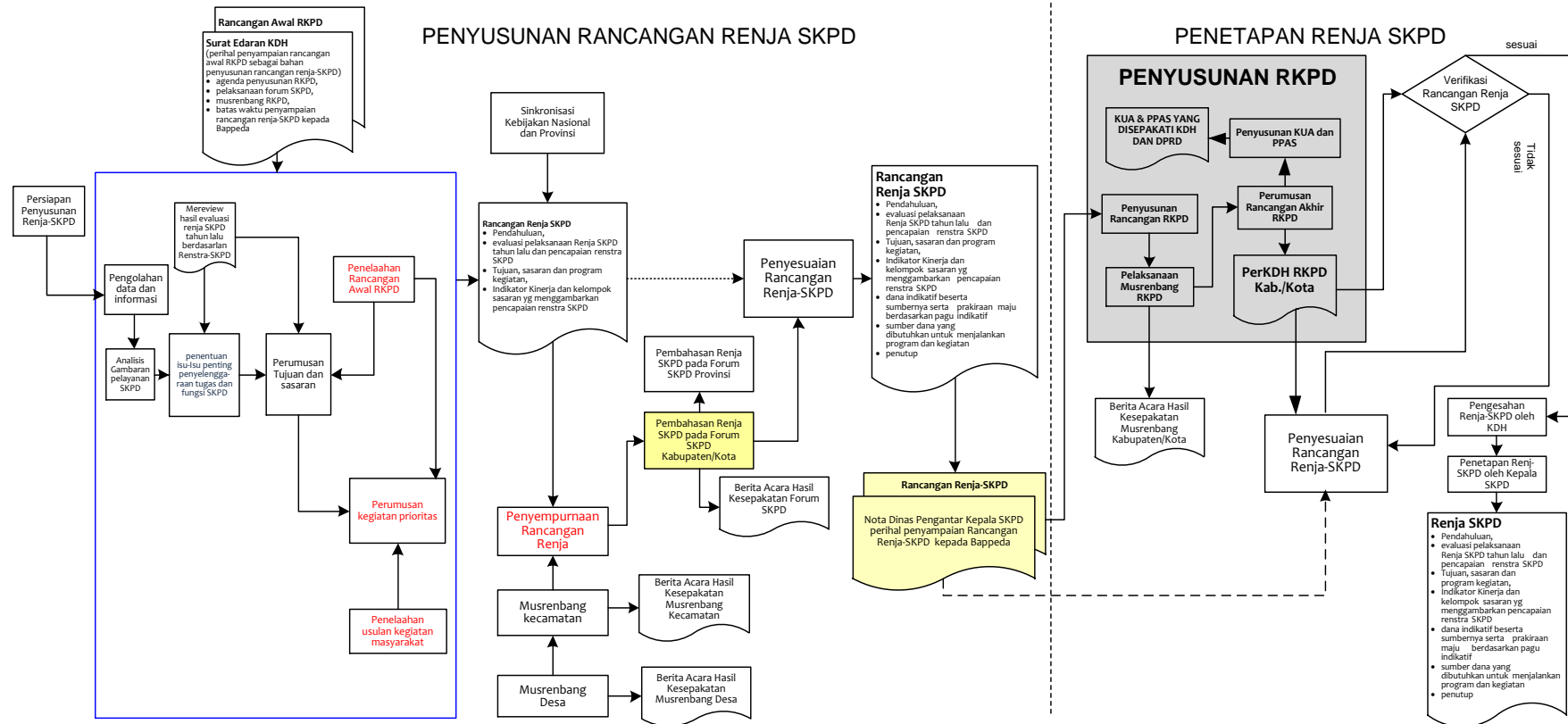
Untuk menyusun RPJMD Kota harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan mengacu pada RPJM Provinsi melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, dan RPJP Nasional merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Kementrian/Lembaga serta dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2020, RKPD juga diacu untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dan Renja

Perangkat Daerah digunakan sebagai Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA PD).

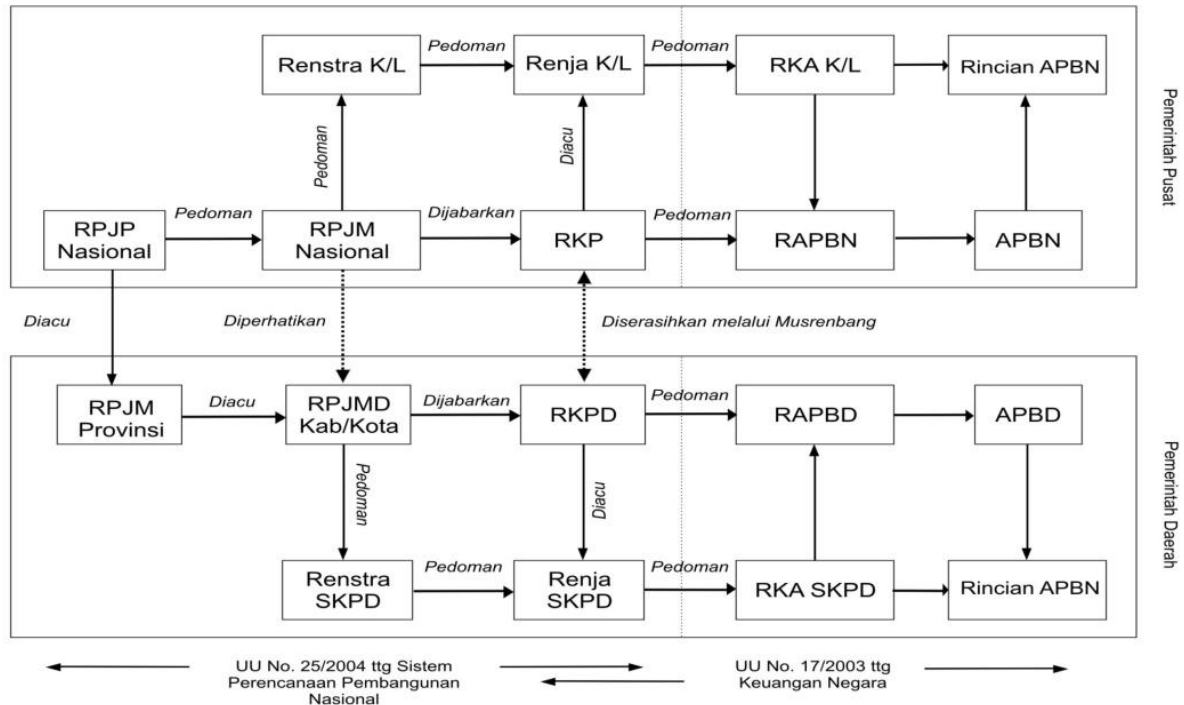
Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1. 2

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Pada bagian ini akan membahas tentang penjelasan tentang undang-undang, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masyarakat Kota Surabaya. Dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan dengan menginformasikan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Program Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.

- Kelembagaan

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga.
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:

- a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
6. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

● Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

Sedangkan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Tahun 007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional TAHUN 2015 - 2019 ;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 ;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025 ;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 .
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (Tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2019). Kajian (review) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Kinerja program Persentase indikator PUG tingkat Kecamatan yang terpenuhi, target Renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi target kinerja tahun 2017 adalah 100%. Renja tahun 2018 dengan target kinerja 100%, perkiraan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%. Renja tahun 2019 dengan target kinerja 100%, perkiraan realisasi kinerja sebesar 100% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%. Sedangkan capaian renstra dengan indikator Kinerja program Persentase indikator PUG tingkat Kecamatan yang terpenuhi dan target kinerja akhir renstra yang sama dengan tahun sebelumnya/ bukan target akumulatif, maka perkiraan realisasi capaian terhadap target renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 100% sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%. Capaian Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarustamaan Gender dengan indikator Kinerja kegiatan jumlah lembaga penguatan dan pengembangan

jaringan pengarusutamaan gender, target kinerja Renstra adalah 72 Lembaga. Tahun 2017 realisasi kinerja yang tercapai adalah 72 lembaga. Pada tahun 2018 Indikator kinerja berubah menjadi Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan gender, dengan target kinerja 13 Kali, dan realisasi sampai dengan Tribulan IV adalah 13 Kali, dan tingkat realisasi sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 72 lembaga sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100% sedangkan untuk tahun 2019 indikator kinerja kembali seperti tahun 2017 yaitu jumlah lembaga Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 147 Lembaga.

- b) Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, target kinerja Renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 33 Lembaga. Realisasi Renja tahun 2017 adalah 33 lembaga. Tahun 2018 nama Kegiatan di ganti dengan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, dengan target kinerja sebesar 34 kali, realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan tribulan IV adalah sebesar 32 kali sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 94,12%. Sedangkan untuk Renja tahun berjalan 2019 target kinerja adalah 25 Kali.
- c) Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 5 Kelurahan. Realisasi kinerja tahun 2017 adalah 5 Kelurahan. Tahun 2018 kegiatan ini tidak dilaksanakan lagi karena di Provinsi dan Pemerintah Pusat kegiatan tersebut masuk di kementrian lain sehingga dilaksanakan oleh Dinas yang lain pula.
- d) Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Jumlah profil gender, dan mapping data permasalahan perempuan yang disusun, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 3 dokumen, realisasi target kinerja tahun 2017 adalah 3 dokumen. Tahun

2018 kegiatan ini diubah menjadi Penyusunan Profil Gender dengan target kinerja 3 dokumen dan sudah tercapai 100%.

- e) Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi pelaksanaan PUG di kota Surabaya adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja jumlah dokumen yang disusun sebanyak 3 Dokumen.
 - f) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 7 kali.
 - g) Peningkatan Pemahaman Pengarustamaan Gender Kepada Masyarakat juga merupakan kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarustamaan gender kepada masyarakat sebanyak 1000 orang.
2. Program perlindungan perempuan dan anak yang memiliki 3 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Indikator Kinerja program Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100%. Target kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 adalah 100%.
 - Indikator Kinerja program Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A), target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 65.21%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 83%. Target kinerja tahun 2018 adalah 66.35% dan tahun 2019 adalah 66,86%.
 - Indikator Kinerja program Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 64%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 53.51%. Target kinerja tahun 2018 adalah 21% dan tahun 2019 adalah 35%.

Capaian Program perlindungan perempuan dan anak dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 289 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 333 orang. Target kinerja tahun 2018 adalah 230 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 489 orang atau 212,6%. Tahun 2019 kegiatan ini dirubah menjadi Pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak.
- b) Pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja jumlah pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak 330 kasus, target kinerja tahun 2019 adalah 330 kasus.
- c) Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 421 lembaga, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 420 lembaga. Target kinerja tahun 2018 adalah 431 Lembaga, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 431 Lembaga atau 100%. Target kinerja tahun 2019 adalah 431 Lembaga, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 413 Lembaga, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 98,09%.
- d) Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 926 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 926 orang, target kinerja tahun 2018 926 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 1802 orang atau 194,6%. Target kinerja tahun 2019 adalah 926 orang, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 936 orang,

Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 101,08%.

- e) Inisiasi Kampung Arek Suroboyo dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang inisiasi Kampung Arek Suroboyo yang dibina, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 154 Kelurahan, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 154 Kelurahan. Renja tahun berjalan (2018) target kinerja tahun 2018 adalah 154 Kelurahan, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 154 Kelurahan atau 100%. Tahun 2019 kegiatan ini dirubah menjadi Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo.
 - f) Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja jumlah kampung kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan, target kinerja tahun 2019 adalah 154 kampung.
 - g) Penyelenggaraan Operasional Shelter adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan, target kinerja tahun 2019 adalah 2 Lembaga.
 - h) Pengelolaan tempat penitipan anak Shelter adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja jumlah tempat penitipan anak yang dikelola selama 12 bulan, target kinerja tahun 2019 adalah 1 Lembaga.
3. Program Keluarga Berencana yang memiliki 4 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Indikator Kinerja program Persentase peserta KB baru, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 84,35%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 96,15%. Target kinerja tahun 2018 adalah 81,95% dan tahun 2019 adalah 82,75%.
 - Indikator Kinerja program Persentase peserta KB aktif, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 80,95%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 80,96%. Target kinerja tahun 2018 adalah 78,40% dan tahun 2019 adalah 79,60%..
 - Indikator Kinerja program Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah

4,90%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 2,37%. Target kinerja tahun 2018 adalah 5,4% dan tahun 2019 adalah 5,25%.

- Indikator Kinerja program Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 19,95%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 18,24%. Target kinerja tahun 2018 adalah 20,50% dan tahun 2019 adalah 20,20%.

Capaian Program Keluarga Berencana dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 2033 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 2016 orang. Target kinerja tahun 2018 adalah 2033 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2019 adalah 2024 orang atau 99,6%. Tahun 2019 kegiatan ini dirubah menjadi Pembinaan Saka Kencana.
- b) Pembinaan Saka Kencana adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Pembinaan Saka Kencana target kinerja tahun 2019 adalah 1 kali.
- c) Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana dengan indikator Kinerja Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 310 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 310 orang, target kinerja tahun 2018 adalah 1850 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 1850 orang atau 100%. Target kinerja tahun 2019 adalah 1740 orang, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 871 orang, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 280,09%.
- d) Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 4000 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 4000 orang, target kinerja tahun 2018 adalah 4560 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 3199 orang atau 70,2%. Target kinerja tahun 2019 adalah 1718 orang, Realisasi

capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 2289 orang, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 57,22%.

- e) Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 600 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 625 orang, target kinerja tahun 2018 adalah 857 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 414 orang atau 48,31%. Target kinerja tahun 2019 adalah 850 orang, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 839 orang, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 97,9%.
- f) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 2 unit, realisasi target kinerja tahun 2017 adalah 3 unit. Tahun 2018 indikator kegiatan ini dirubah menjadi Jumlah kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana yang dilaksanakan. Tahun 2019 Indikator kinerja berubah menjadi Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana.
- g) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana yang dilaksanakan. Pada tahun 2018 target kinerja 2 Kegiatan, realisasi target sampai dengan triwulan III tahun 2018 adalah 37 Kegiatan atau 1600%.
- h) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga yang Mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana), target kinerja tahun 2019 adalah 31 Lembaga.

- i) Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah profil pengendalian penduduk yang disusun , target kinerja tahun 2019 adalah 1 Dokumen.
4. Program Bina Keluarga yang memiliki 2 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Indikator Kinerja program Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100%. Target kinerja tahun 2018 adalah 70,39% dan tahun 2019 adalah 92,89%.
 - Indikator Kinerja program Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 3%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0,05%. Target kinerja tahun 2018 adalah 3,30% dan tahun 2019 adalah 3,20%..

Capaian Program Bina Keluarga dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 1350 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 1313 orang, target kinerja tahun 2018 adalah 1350 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 1329 orang atau 98,4%. Target kinerja tahun 2019 adalah 1350 orang, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 1330 orang, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 98,52%.
- b) Pembinaan Keluarga Sejahtera dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 1240 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 1144 orang, target kinerja tahun 2018 adalah 1280 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 1371 orang atau 107,1%. Target kinerja tahun 2019 adalah 1280 orang, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 1231 orang,

Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 99,27%.

- c) Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah PUSPAGA yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan, target kinerja tahun 2019 adalah 2 Lembaga.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan indikator Kinerja program Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 75%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 68,34%. Target kinerja tahun 2018 adalah 75% dan tahun 2019 adalah 75%. Capaian Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- a) Dinamisasi Data Keluarga Berpenghasilan Rendah dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpenghasilan rendah, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 154 Kelurahan, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 154 Kelurahan, target kinerja tahun 2018 adalah 154 Kelurahan, realisasi target sampai dengan triwulan V tahun 2018 adalah 307 Kelurahan atau 199,4%. Tahun 2019 kegiatan ini dipindah ke Dinas Sosial.
 - b) Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 1025 orang, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 544 orang, target kinerja tahun 2018 adalah 327 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 327 orang atau 100%. Target kinerja tahun 2019 adalah 300 orang, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 1171 orang, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 114,24%.
 - c) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 63 Lembaga, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 72 Lembaga, target kinerja tahun 2018 adalah 63 Lembaga, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 85 Lembaga atau 134,9%. Target kinerja tahun 2019

adalah 63 Lembaga, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 66 Lembaga, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 104,76%.

- h) Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 1 dokumen, realisasi target kinerja tahun 2017 adalah 1 dokumen. Tahun 2018 indikator kinerjanya berubah menjadi Jumlah peserta yang difasilitasi program kesejahteraan keluarga.
 - i) Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga, pada tahun 2018 indikator kinerja yang berubah menjadi Jumlah peserta yang difasilitasi program kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini pada tahun 2018 dengan target kinerja 866 orang, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 869 orang atau 100,3%. Tahun 2019 kegiatan ini dirubah menjadi Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri.
 - d) Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri, target kinerja tahun 2019 adalah 12 Dokumen.
6. Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif yang memiliki 2 indikator kinerja program dengan penjabaran sebagai berikut:
- Indikator Kinerja program Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 9%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 12,79%. Target kinerja tahun 2018 adalah 6% dan tahun 2019 adalah 7%.
 - Indikator Kinerja program Persentase rumah kreatif yang beroperasi, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 25%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 62,50%. Target kinerja tahun 2018 adalah 13,12% dan tahun 2019 adalah 15,62%.

Capaian Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah Gedung yang dipelihara, target kinerja renstra sampai dengan

tahun 2021 adalah 1 unit, realisasi target kinerja tahun 2017 adalah 1 unit. Tahun 2018 kegiatannya berubah menjadi Pengelolaan Rumah Kreatif.

- b) Pengelolaan Rumah Kreatif dengan indikator kinerja jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan. Kegiatan ini baru ada pada tahun 2018 dengan target kinerja 1 bangunan, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 12 bangunan atau 100%. Target kinerja Tahun 2019 adalah 1 bangunan.
 - c) Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif adalah kegiatan baru untuk tahun 2019 dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handycraft di rumah kreatif, target kinerja tahun 2019 adalah 25 orang.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja program Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 100%. Target kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 adalah 100%. Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 9 Dokumen, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 9 Dokumen, target kinerja tahun 2018 adalah 12 Dokumen, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 12 Dokumen atau 100%. Tahun 2019 kegiatan ini dihapus.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Kinerja program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 80%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 77,06%. Target kinerja tahun 2018 adalah 74% dan tahun 2019 adalah 76%. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 56 Jenis, realisasi target kinerja tahun 2017 adalah 56 Jenis. Tahun 2018

indikator kegiatannya berubah menjadi persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.

- b) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja kegiatan yang baru yaitu persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. Tahun 2018 dengan target kinerja 100%, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 100% atau 100%. Target kinerja Tahun 2019 adalah 100%.

9. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan indikator Kinerja program Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 87,45%. Target kinerja tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 adalah 100%. Capaian Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan sebagai berikut:

- a) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan indikator Kinerja kegiatan Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola, target kinerja renstra sampai dengan tahun 2021 adalah 114 unit, realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 110 unit, target kinerja tahun 2018 adalah 214 unit, realisasi target sampai dengan triwulan IV tahun 2018 adalah 909 unit atau 424,8%. Target kinerja tahun 2019 adalah 131 unit/buah, Realisasi capaian indikator kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 110 unit/buah, Tingkat capaian realisasi target Renstra sampai dengan tahun 2019 adalah 96,49%.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kota Surabaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1		Urusan Pemerintahan									
1	1	Urusan Wajib									
1	1	2.02.01	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	1	2.02.01	0001 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender	72 Lembaga	72 Lembaga	72 Lembaga	100 %	147 Lembaga	147 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	2.02.01	0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Fasilitas Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	-	-	13 Kali	13 Kali	100%	-	-	
1	1	2.02.01	0002	Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	33 Lembaga	33 Lembaga	-	-	-	-	-	
1	1	2.02.01	0002	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan	-	-	34 Kali	32 Kali	94,1%	25 Kali	25 Kali	100%
1	1	2.02.01	0003	Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah lembaga yang berperan serta menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera	5 Kelurahan	5 Kelurahan	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		(P2WKSS)									
1	1	2.02.01	0004	Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan	Jumlah Profil Gender, profil anak dan mapping data permasalahan perempuan dan anak yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-
1	1	2.02.01	0004	Penyusunan Profil Gender	Jumlah Profil Gender yang disusun	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-
1	1	2.02.01	0005	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	7 Kali
1	1	2.02.01	0007	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	-	-	-	3 Dokumen
1	1	2.02.01	0008	Peningkatan Pemahaman Pengarustamaan	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan	1000 Orang	-	-	-	-	1000 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Gender Kepada Masyarakat	pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat										
1	1	2.02.02	Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	
				Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	68,10%	83,00%	66,35%	-	-	66,86%	67,15%	100%	
				Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	64%	53,51%	21%	-	-	35%	48%	100%	
1	1	2.02.02	0001	Fasilitasi Penanganan	Jumlah permasalahan	289 Orang	333	230	489 Orang	212,6%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Permasalahan Perempuan Dan Anak	perempuan dan anak yang ditangani	Orang	Orang								
1	1	2.02.02	0001	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak 330 kasus	-	-	-	-	330 kasus	330 kasus	100%	
1	1	2.02.02	0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai	421 Lembaga	420 Lembaga	431 Lembaga	431 Lembaga	100%	431 Lembaga	431 Lembaga	100%
1	1	2.02.02	0003	Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A	926 Orang	926 Orang	926 Orang	1802 Orang	194,6%	926 Orang	926 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	2.02.02	0004	Inisiasi Kampung Arek Suroboyo	Jumlah lembaga yang Inisiasi Kampung Arek Suroboyo yang dibina	154 Kelurahan	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100%	-	-	-	
1	1	2.02.02	0004	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah Kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	-	-	-	-	154 Kampung	154 Kampung	100%	
1	1	2.02.02	0037	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Jumlah Shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	-	-	-	-	2 lembaga	2 lembaga	100%	
1	1	2.02.02	0038	Pengelolaan Tempat Penitipan Anak	Jumlah Tempat Penitipan Anak yang dikelola selama 12 bulan	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	100%	
1	1	2.08.01		Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB baru	84,35%	96,15%	81,95%	-	-	82,75%	83,55%	100%
					Persentase peserta KB aktif	80,95%	80,96%	78,40%	-	-	79,60%	80,89%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4,90%	2,37%	5,4%	-	-	5,25%	4,95%	100%	
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,95%	18,24%	20,50%	-	-	20,20%	20,05%	100%	
1	1	2.08.01 0001 Pembinaan Peduli Keluarga Berencana	Jumlah peserta peduli keluarga berencana yang dibina	2033 Orang	2016 Orang	2033 orang	2024 Orang	99,6%	-	-	-
1	1	2.08.01 0001 Pembinaan Saka Kencana	Jumlah Pembinaan Saka Kencana	-	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100%
1	1	2.08.01 0002 Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	310 Orang	310 Orang	1850 orang	1850 Orang	100%	1740 orang	1740 orang	100%
1	1	2.08.01 0003 Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	4000 Orang	4000 Orang	4560 orang	3199 orang	70,2%	1718 orang	1718 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	2.08.01	0004	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	600 Orang	625 Orang	857 orang	839 Orang	97,9%	850 Orang	850 orang	100%
1	1	2.08.01	0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	2 Unit	3 Unit	99 Unit	37 Unit	37,4%	2 Unit	2 Unit	100%
1	1	2.08.01	0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana yang dilaksanakan	-	-	31 Lembaga	31 Lembaga	100%	-	-	-
1	1	2.08.01	0007	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Jumlah Lembaga yang Mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	31 Lembaga	31 Lembaga	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		(DAK Bidang Keluarga Berencana)											
1	1	2.08.01	0008	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Jumlah profil pengendalian penduduk yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1	1	2.08.02		Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	100%	100%	70,39%	-	-	92,89%	100%	100%
					Persentase Pasangan Usia Subur yang Usianya Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3%	0,05%	3,30%	-	-	3,20%	3,1%	100%
1	1	2.08.02	0001	Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina	1350 Orang	1313 Orang	1350 Orang	1329 Orang	98,4%	1350 Orang	1350 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Keluarga Lansia yang dibina											
1	1	2.08.02	0002	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	1240 Orang	1144 Orang	1280 Orang	1371 orang	107,1%	1280 Orang	1280 orang	100%
1	1	2.08.02	0003	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah PUSPAGA yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	-	-	-	-	-	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
1	1	2.08.03		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	68,34%	75%	-	-	75%	80%	100%
1	1	2.08.03	0001	Dinamisasi Data Keluarga Berpenghasilan Rendah	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga berpenghasilan rendah	154 Kelurahan	154 Kelurahan	154 Kelurahan	307 Kelurahan	199,4%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	1	2.08.03	0002	Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan	1025 Orang	544 Orang	327 Orang	327 orang	100%	300 Orang	300 orang	100%
1	1	2.08.03	0003	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi	63 Lembaga	72 Lembaga	63 Lembaga	85 Lembaga	134,9%	63 Lembaga	63 Lembaga	100%
1	1	2.08.03	0004	Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen program Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1	1	2.08.03	0004	Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang difasilitasi program kesejahteraan keluarga	-	-	866 orang	869 orang	100,3%	-	-	-
1	1	2.08.03	0004	Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah Dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri	-	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1	2			Urusan Pilihan		-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	2	2.02.04	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	9%	12,79%	6%	-	-	7%	8%	100%	
				Persentase rumah kreatif yang beroperasi	25%	62,50%	13,12%	-	-	15,62%	100%	100%	
1	2	2.02.04	0001	Pembinaan Rumah Kreatif Kandangan	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	
1	2	2.02.04	0001	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	-	-	1 bangunan	12 bangunan	1200%	1 bangunan	1 bangunan	100%
1	2	2.02.04	0011	Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handicraft di Rumah Kreatif	-	-	-	-	25 orang	25 orang	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2		Penujng Urusan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	Fungsi Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	100%	100%	-	-	100%	100 %	100%	
2	1	2.01.02	0006	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-
2	2			Unsur Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%	77,06%	74%	-	-	76%	79%	100%
2	2	2.02.01	0006	Penyediaan Barang	Jumlah Jenis Barang	56 Jenis	56 Jenis	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan TW-IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	dan Jasa Perkantoran yang Disediakan										
2	2	2.02.01	0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	-	-	100%	66,41%	66,41%	100%	100%	100%
2	2	2.02.02		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	87,45%	100%	-	-	100%	100%	100%
2	2	2.02.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	114 Unit	110 Unit	214 unit	909 unit	424,8%	131 unit/buah	131 unit/buah	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan tingkat kepadatan penduduk di beberapa kecamatan yang mencapai lebih dari 20.000 jiwa/KM2 yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warga.

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sebagai Lembaga Teknis Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan dan monitoring di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. Selain itu juga memberikan pelayanan dengan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. Di bidang perlindungan perempuan dan anak bentuk layanan yang diberikan adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak skala kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan tugas dan fungsinya bisa dilihat dari capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dijelaskan sebagai berikut:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya wajib menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya terkait ruang lingkup penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang dan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal memberikan ketentuan bahwa Standar

Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan publik dasar yang merupakan urusan wajib Perangkat Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya memiliki Standar Minimal yang wajib dilaksanakan yaitu :

1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014 yang terdiri dari adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
- b. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
- c. Penyediaan Informasi Data Mikro

Dalam peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Kota Surabaya mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator :
 - 1) Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan target sebesar 70%
 - 2) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target sebesar 5%
 - 3) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dengan target 3.5%
 - 4) Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB dengan target 87%
 - 5) Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif dengan target sebesar 65%

- 6) Indikator Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan target sebesar 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan
 - 7) Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dengan target sebesar 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan
- b. Jenis pelayanan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan indikator cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan target sebesar 30% setiap tahun.
- c. Jenis pelayanan penyediaan informasi data mikro dengan indikator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan dengan target sebesar 100% setiap tahun.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) dengan indikator :
- 1) Realisasi Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 100%
 - 2) Realisasi Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 18,24%
 - 3) Realisasi Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 0,05%
 - 4) Realisasi Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 76,27%
 - 5) Realisasi Indikator Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 82,00%
 - 6) Realisasi Indikator Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan sebesar 100%
 - 7) Realisasi Indikator Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan sebesar 77,92%

- b. Jenis pelayanan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan capaian Indikator cakupan penyediaan alat dan obat kotrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 100% setiap tahun
- c. Jenis pelayanan penyediaan informasi data mikro dengan capaian indikator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan sebesar 100% setiap tahun.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- Dalam peraturan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengamanatkan target SPM yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Jenis Pelayanan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator:
 - 1) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 100%
 - b. Jenis Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
 - 1) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dengan target sebesar 100%

c. Jenis Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:

- 1) Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 75%
- 2) Indikator Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dengan target sebesar 75%

d. Jenis Pelayanan Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:

- 1) Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sebesar 80%
- 2) Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan target sebesar 50%

e. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:

- 1) Indikator Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan target sebesar 50%
- 2) Indikator Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan target sebesar 100%

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator:

- 1) Capaian Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%

- b. Jenis Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit merupakan tugas dari Dinas Kesehatan
- c. Jenis Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
 - 2) Capaian Indikator Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%
- d. Jenis Pelayanan Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tugas dari Pengadilan
 - 2) Capaian Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan tugas dari Pengadilan
- e. Jenis Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator:
- 1) Capaian Indikator Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dari Dinas Sosial
 - 2) Capaian Indikator Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dari Dinas Sosial

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan aspek penilaian yang terdiri:

- a. ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
- e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang - undangan;
- h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
- i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber- sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- l. pengelolaan potensi daerah; dan
- m. terobosan /inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi; dan
- b. kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

IKK terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Memiliki indikator sebagai berikut:

1. Prevalensi peserta KB aktif
2. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa / kelurahan
3. PKK aktif

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator Prevalensi peserta KB aktif sebesar 80,96%
2. Capaian indikator Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan sebesar 2.57
3. Capaian indikator PKK aktif sebesar 100%

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	70%	70%	70%	70%	100%	-	-	-	-
2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	5%	5%	5%	5%	18.24%	-	-	-	-
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	0.05%	-	-	-	-
4	Pasangan Usia Subur peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	87%	87%	87%	87%	76.27%	-	-	-	-
5	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	65%	65%	65%	65%	82.00%	-	-	-	-
6	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	100%	-	-	-	-
7	Ratio Petugas Lapangan	Bidang Keluarga	-	1	1	1	1 Petugas	77.92%	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Berencana dan Keluarga Sejahtera		Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan					
8	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	30% setiap tahun	30% setiap tahun	30% setiap tahun	30% setiap tahun	100%	-	-	-	-
9	cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100% setiap tahun	100%	-	-	-	-
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
11	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	75%	75%	75%	75%	100%	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	75%	75%	75%	75%	100%	-	-	-	-
13	Prevalensi peserta KB aktif	-	Indikator Kinerja Kunci	77.31%	78.40%	79.60%	80.89%	80.96%	-	-	-	-
15	Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluhan KB (PLKB/PKB) di setiap desa / kelurahan	-	Indikator Kinerja Kunci	2	2	2	2	2.57	-	-	-	-
15	PKK aktif	-	Indikator Kinerja Kunci	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- a. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
- b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan perempuan yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan inkubasi usaha mandiri, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi melalui promosi dan pemeran.
- d. Isu Nasional dan Global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan harapan pencapaian pada tahun 2031. 17 target sasaran utama yaitu 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan berkualitas, 5) Kesetaraan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, 10) Mengurangi Kesenjangan, 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas, 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, 13) Aksi Terhadap Iklim, 14) Kehidupan Bawah Laut, 15) Kehidupan di Darat, 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan

Kedamaian, dan 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pemerintah Kota Surabaya berfokus pada poin ke-11 yang jika disesuaikan dengan pembangunan kota Surabaya yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Sementara poin lainnya akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan Kota Surabaya.

Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Rencana Kerja tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melihat target dan realisasi secara keseluruhan hampir semua telah tercapai 100%. Untuk renja tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian realisasi terhadap target hampir keseluruhan mendekati 100%.

Sedangkan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2018 secara keseluruhan masih jauh dari target renstra yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan tahun 2018 banyak indikator kinerja dan target kegiatan yang berubah.

Permasalahan dan Hambatan

Pelaksanaan renja tahun 2017 dan 2018 tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang berarti, apabila terdapat hambatan bisa dengan cepat dicarikan solusi melalui koordinasi, hal ini berkat dukungan dana yang sudah dianggarkan, serta dukungan sumber daya manusia yang menjalankan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:
 - 1. Terpenuhinya anggaran kegiatan
 - 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran
 - 3. Kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan, pembinaan dan pelatihan keluarga berpendapatan rendah
 - 4. Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 - 5. Pendataan keluarga miskin berbasis IT
- b. Kelemahan yang dimiliki terdiri dari:
 - 1. Jumlah dan Kompetensi SDM
 - 2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan
 - 3. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan
 - 4. Pemanfaatan data keluarga miskin

Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang muncul bisa diidentifikasi melalui peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:

- a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:
 - 1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
 - 2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
 - 3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
 - 4. Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
 - 5. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar Perangkat Daerah
- b. Ancaman yang dimiliki terdiri dari:
 - 1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
 - 2. Mentalitas sebagian masyarakat miskin
 - 3. Overlapping program dan kegiatan antar Perangkat Daerah

4. Penambahan data diluar data keluarga miskin yang telah ditetapkan
5. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak

Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020, isu-isu dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program
4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak tertangani dengan baik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD untuk kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender, kegiatan masuk dalam klaster Pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp.1.047.087.797,- outputnya terdiri dari:
 - Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender 289 lembaga

- Kelompok sasaran: Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, Seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, Aparat Penegak Hukum.
 - Bentuk Kegiatan adalah Capacity Building Focal Point, presentasi profil Kecamatan Responsif Gender, dialog dengan Aparat Penegak Hukum, diskusi interaktif, serta simulasi materi yang dipandu oleh pemateri/praktisi.
 - Materi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan capacity building serta dilakukan evaluasi secara langsung sehingga diharapkan Pengarusutamaan Gender dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
 - Frekuensi pelaksanaan kegiatan yaitu 12 kali
 - Alasan pemilihan target: Membangun Sinergi dengan OPD, Kecamatan dan APH, perihal peningkatan pemahaman gender kepada seluruh OPD dan APH maupun aplikasinya di masyarakat.
2. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan, kegiatan masuk dalam kluster Fasilitasi, dengan kebutuhan anggaran Rp. 1.327.475.402,- outputnya terdiri dari:
- Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan 29 Kali
 - Kelompok sasaran kegiatan : Lembaga/ organisasi peduli pemberdayaan perempuan Yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Bentuk kegiatan : Capacity Building Anggota DWP, Hari Kartini - Hari Anti Kekerasan - Hari Ibu, Jambore Kader PKK, Lomba 10 Program Pokok PKK antar Kecamatan, Lomba Dalam Rangka Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2019, Lomba Daur Ulang dari Bahan Plastik dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga antar PKK RW Percontohan, Pelatihan Kader PKK, Pelatihan Ketrampilan (DWP), Pelatihan Membuat Perangkat Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih dan Sayang Keluarga (PAR CINTA dan KASIH), Pelatihan UP2K PKK, Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan

Tahun 2019, Peningkatan Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan, Peringatan Hari Ibu dan HUT DWP, Peringatan Hari Kartini (DWP), Persiapan Mengikuti Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tk. Prop. Jawa Timur, Persiapan Mengikuti Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan Tk. Nasional, Persiapan Mengikuti Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan Tk. Provinsi Jawa Timur, Seminar Kerohanian Organisasi Perempuan (DWP), Sosialisasi Pencegahan Pernikahan pada Usia Dini menuju Generasi yang Tangguh, Sosialisasi Program Kerja TP PKK, Sosialisasi tentang hukum waris menurut syariat Islam (MUI), Sosialisasi tentang Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini dan Pembinaan Karakter Keluarga, sosialisasi tentang pentingnya pemahaman dan kesetaraan dalam Program KB menuju Keluarga yang Berkualitas.

- Materi Kegiatan: Peningkatan peran organisasi peduli pemberdayaan Perempuan
 - Frekuensi pelaksanaan kegiatan sebanyak 25 kali
 - Alasan penentuan target: PKK merupakan salah satu organisasi pemberdayaan perempuan di Kecamatan, Kelurahan, bahkan sampai dasawisma yang langsung berhubungan dengan masyarakat - DWP merupakan organisasi Kewanitaan yang beranggotakan istri ASN.
3. Kegiatan Penyusunan profil gender dan pengembangan evaluasi program pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, kegiatan masuk dalam klaster Analisa/Kajian/Evaluasi/Review (dengan survei data primer), dengan kebutuhan dana Rp. 401.287.484,- outputnya terdiri dari:
- Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen
 - Kelompok sasaran : Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya, seluruh Kecamatan di Kota Surabaya
 - Bentuk Kegiatan : Penyusunan Profil Gender Kota Surabaya, Persiapan Anugerah Parahita Ekapraya

- Materi Kegiatan : Pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender di Kota Surabaya
 - Alasan penentuan target : Pedoman bagi upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
4. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak, kegiatan masuk dalam klaster Pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp.917.990.141,- untuk sub kegiatan Pembinaan Anak dengan Permasalahan Sosial outputnya terdiri dari:
- Pendampingan berupa Konseling, Medis, Psikososial, Hukum : 4 jenis materi (pendampingan)
 - Frekuensi pendampingan 12 kali dalam 1 tahun : 12 kali
 - Jumlah orang yang mendapat pendampingan : 30 peserta
- Dengan alasan menentukan target :
- jumlah anak yang berada di shelter kurang lebih 30 orang
- Sub kegiatan Pendampingan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak outputnya terdiri dari:
- Pendampingan berupa Konseling, Medis, Psikososial, Hukum : 4 jenis materi (pendampingan)
 - Frekuensi pendampingan 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
 - Jumlah orang yang mendapat pendampingan : 170 peserta
- Dengan alasan menentukan target :
- *mengikuti tahun sebelumnya*
5. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak, kegiatan masuk dalam klaster Fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp.1.052.891.913,- untuk sub kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak outputnya terdiri dari:
- Lembaga masyarakat yang difasilitasi : 1 jenis (obyek)
 - Frekuensi fasilitasi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
 - Jumlah lembaga eksternal yang difasilitasi : 221 lembaga
- Dengan alasan menentukan target :
- menyesuaikan jumlah gugus tugas Kota Layak Anak

Sub kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja outputnya terdiri dari:

- Sekolah dan siswanya : 2 jenis (obyek)
- Frekuensi fasilitasi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
- Jumlah lembaga eksternal (sekolah) yang difasilitasi : 210 lembaga

Dengan alasan menentukan target :

- *Penambahan Sosialisasi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) kegiatan Sosialisasi Dinamika Remaja *

6. Kegiatan Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan masuk dalam kluster Pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya/Seminar, dengan kebutuhan dana Rp.528.711.761,- untuk sub kegiatan Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A outputnya terdiri dari:

- Masyarakat yang tergabung dalam PKBM dan Satgas PPA : 2 jenis (obyek)
- Frekuensi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali
- Jumlah peserta PKBM 310 orang dan Satgas PPA 616 orang : 926 peserta
- Capacity Building melalui paparan materi dan FGD : 1 topik/materi (jumlah/jenis)

Dengan alasan menentukan target :

- Satgas PPA 4 orang x 154 kelurahan = 616 orang PKBM 10 orang x 31 Kecamatan = 310 orang. masing-masing kegiatan dilakukan 4 kali

7. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo, kegiatan masuk dalam kluster Fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp.713.951.950,- untuk sub kegiatan Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampung Arek Suroboyo outputnya terdiri dari:

- Kampung yang difasilitasi di setiap kelurahan : 1 jenis (obyek)
- Frekuensi fasilitasi 1 kali dalam 1 tahun : 1 kali

- Jumlah kampung yang difasilitasi : 154 lembaga

Dengan alasan menentukan target :

- di setiap kelurahan terdapat 1 IKAS yang harus dibina

8. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Shelter, kegiatan masuk dalam klaster Pemeliharaan non konstruksi, dengan kebutuhan dana Rp.1.427.156.971,- untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Operasional Shelter outputnya terdiri dari:

- 12 kali
- 2 lembaga
- 15 rekening

Dengan alasan menentukan target :

- shelter yang dikelola oleh DP4PA ada 2 (shelter perempuan dan shelter laki-laki)

9. Kegiatan Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana, kegiatan masuk dalam klaster fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp.1.251.582.273,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana : 2208 Orang
- Kelompok Sasaran yaitu Kader KB, Kader IMP, dan pembinaan pada Petugas PLKB
- Bentuk kegiatan: Kader IMP: Melakukan Pembinaan kepada Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan masing-masing. Petugas PLKB: Pembinaan dan Capacity Building tentang Program KB ter Update.
- Materi kegiatan: Bentuk Kegiatan Pembinaan Peduli Keluarga Berencana adalah Pembinaan Kegiatan Institusi Masyarakat Perkotaan Pembinaan dalam Capacity Building dan evaluasi program KB di kecamatan masing-masing
- Frekuensi pelaksanaan Kegiatan: Kader IMP: 2 Hari x 12 Kali, Petugas PLKB: 2 Hari x 1 Kali

- Alasan: Setiap kelurahan memiliki kader KB untuk melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB dan setiap kelurahan memiliki pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK) serta Sub PPKBK yang ada di tingkat RW untuk mendukung program pengendalian kelahiran dan pengendalian penduduk. Penguatan terhadap Kemampuan dan Kapasitas Petugas Penyuluh KB untuk mendukung Program KB

10. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga, kegiatan masuk dalam klaster fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp. 1.431.034.842,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah Akseptor KB yang Mendapatkan Pelayanan KB : 650 orang
- Kelompok sasaran: Masyarakat atau calon akseptor KB
- Bentuk Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan Pelayanan KB MOW dan MOP pada Pasangan Usia Subur warga Kota Surabaya yang dilaksanakan dengan melakukan pelayanan rutin di Fasilitas Kesehatan maupun melalui Bakti Sosial
- Materi Kegiatan: Pelayanan KB
- Frekuensi pelaksanaan 12 bulan
- Alasan: Sebagai upaya pengendalian kualitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran dari Pasangan Usia Subur

11. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana, kegiatan masuk dalam klaster Pengadaan/Penyediaan, dengan kebutuhan dana Rp. 1.143.636.000,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana : 2 unit/buah
- Kelompok Sasaran: Masyarakat

- Bentuk kegiatan: Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog
- Materi kegiatan: Lelang(Tender) atau/dan Penunjukan Langsung atau/dan e-katalog
- Frekuensi pelaksanaan kegiatan 1 kali
- Alasan: DAK Sub Bidang KB pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan di RKP 2017 dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu: 1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun); 2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR); 3. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO); 4. Meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 5. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); 6. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15%u201319 tahun).

12. Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana), kegiatan masuk dalam klaster Fasilitasi, dengan kebutuhan dana Rp. 3.894.200.000,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) : 31 lembaga
- Kelompok Sasaran: jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) : 32 lembaga
- Bentuk Kegiatan: Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) adalah pembinaan pada Kampung yang dipilih sebagai kampung KB yang terdiri dari kegiatan antara lain: 1. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB ; 2. forum musyawarah tingkat desa Kampung KB 3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB 4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan 5. Balai Penyuluhan 6. Pembinaan Kader KB Setiap sub kegiatan dimaksud diatas dihadiri oleh masyarakat untuk mendapatkan capacity building yang didampingi oleh narasumber.
- Frekuensi pelaksanaan kegiatan yaitu 12 bulan

- Alasan: Kegiatan dimaksud diatas ditujukan untuk mendampingi secara intensif wilayah RW yang kondisinya jumlah penduduk, kebersihan dan lain-lain dianggap masih kurang untuk menjadi lebih baik

13. Kegiatan Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk, kegiatan masuk dalam klaster Perencanaan, dengan kebutuhan dana Rp. 225.161.130,- outputnya terdiri dari:

- Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun : 1 dokumen
- Kelompok sasaran: Dokumen profil penduduk
- Bentuk Kegiatan: Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah Pertama melakukan identifikasi kondisi eksisting aspek kuantitas penduduk, kependudukan dan keluarga berencana di Kota Surabaya. Kedua melakukan analisis faktor faktor yang berkaitan dengan masalah kependudukan, kuantitas penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ketiga merumuskan isu strategis Kuantitas penduduk Kota Surabaya
- Materi Kegiatan: 1. Menyepakati latar belakang, tujuan dan metode penyusunan Profil Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Menyusun garis besar isi Profil Pengendalian Kuantitas Penduduk 3. Mengidentifikasi sumber data kependudukan yang dipakai 4. Mengidentifikasi parameter kependudukan apa saja yang akan digunakan
- Frekuensi pelaksanaan kegiatan yaitu 1 kali
- Alasan : Agar dapat memberikan gambaran informasi yang akurat berkaitan dengan situasi dan kondisi pengendalian penduduk

14. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri, Kegiatan masuk dalam klaster pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 1.304.280.603,- output terdiri dari :

- Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri bagi peserta baru dari warga berpenghasilan rendah sebanyak 100 orang.

- Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri bagi 327 orang binaan Inkubasi Usaha Mandiri tahun 2018 dan 300 orang binaan Inkubasi Usaha Mandiri Tahun 2019.
- Pelaksanaan pendampingan bagi binaan Inkubasi Usaha Mandiri selama 12 bulan
- Dengan alasan menentukan target : Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

15. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi, Kegiatan masuk dalam klaster pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 1.022.476.666,- untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi output terdiri dari :

- Fasilitasi pemasaran melalui Rumah Kreatif Masyarakat Surabaya (RUKMAYA) di 3 (tiga) stand selama 12 bulan bagi binaan Inkubasi Usaha Mandiri & UPPKS dan anggota Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda Kota Surabaya).
- Fasilitasi pemasaran melalui pameran (Inacraft, SGE, Jatim Fair) bagi 48 (empat puluh delapan) anggota binaan Inkubasi Usaha Mandiri & UPPKS dan 15 (lima belas) anggota Dekranasda Kota Surabaya
- Fasilitasi pemasaran melalui rombongan di 5 (lima) lokasi selama 12 bulan.
- Target sasaran sebanyak 15 lembaga.
- Operasional dan peningkatan sarana RUKMAYA di 3 (tiga) stand selama 12 bulan.
- Terlaksananya HUT Dekranasda Kota Surabaya tahun 2020
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi 175 orang anggota dekransda
- Dengan alasan menentukan target : Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

16. Kegiatan Pembinaan terhadap Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia, kegiatan masuk dalam klaster pendampingan dengan kebutuhan dana Rp.431.705.219,- untuk sub kegiatan Pembinaan terhadap Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina

Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia, dengan total outputnya 1350 orang terdiri dari :

- a. Bina Keluarga Balita outputnya terdiri dari :
 - Dilaksanakan selama 2 hari dengan waktu 3 bulan (Pebruari, Maret dan April)
 - Jumlah peserta 1000 orang dari 31 Kecamatan
 - Peserta adalah Kader dan Wali Murid/Orangtua
 - Materi yang disampaikan : 2 (dua) jenis materi
 - Dengan alasan menentukan target : Mendukung pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
- b. Bina Keluarga Remaja outputnya terdiri dari :
 - Dilaksanakan selama 2 hari di Bulan Juni
 - Jumlah Peserta 250 orang dari 31 Kecamatan
 - Peserta adalah kader dan/atau mereka yang berhubungan langsung dengan remaja (ayah, ibu, atau pengasuh)
 - Materi yang disampaikan : 2 (dua) jenis materi
 - Dengan alasan menentukan target : Mendukung pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
- c. Bina Keluarga Lansia outputnya terdiri dari :
 - Dilaksanakan selama 2 hari Bulan Juni
 - Jumlah Peserta 100 orang dari 31 Kecamatan
 - Peserta adalah kader dan/atau mereka yang berhubungan langsung dengan lansia (ayah, ibu, atau pengasuh)
 - Materi yang disampaikan : 2 (dua) jenis materi
 - Dengan alasan menentukan target : Mendukung pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia

17. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera, kegiatan masuk dalam klaster sosialisasi dengan kebutuhan dana Rp. 699.249.396,- untuk outputnya 1240 orang terdiri dari :

- Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dilaksanakan selama 2 Bulan (Juli, Agustus)

- Jumlah Peserta 1240 orang dari 31 Kecamatan
- Peserta adalah 20 keluarga yang terdiri dari suami istri dengan rincian : 20 keluarga x 2 orang (suami istri) x 31 kecamatan = 1240 orang
- Materi yang disampaikan : 2 (dua) jenis materi
- Sedangkan 40 orang adalah jumlah klien yang berkunjung/konseling ke Puspaga
- Total target 1280 orang
- Dengan alasan menentukan target : Mendukung pembinaan keluarga sejahtera

18. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Puspaga, kegiatan masuk dalam klaster fasilitasi dengan kebutuhan dana Rp. 628.449.180,- untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Operasional Puspaga, dengan outputnya terdiri dari :

- Melibatkan 2 lembaga yaitu : Ruang Puspaga dan Ruang Layanan Keluarga ABK
- Metode Pelaksanaan baik Puspaga maupun Ruang Layanan Keluarga ABK :
 - a. Melakukan pelayanan konseling keluarga bagi masyarakat Kota Surabaya
 - b. Melakukan psikoedukasi bagi orang tua atau keluarga
 - c. Mengadakan kelas parenting baik parenting umum maupun parenting ABK dan mengadakan kelas pra nikah
 - d. Melakukan sosialisasi ke masyarakat Kota Surabaya melalui Kecamatan, Kelurahan, Sekolah dan instansi terkait
 - e. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia, kegiatan pembinaan keluarga sejahtera
 - f. Mendukung kegiatan Pemerintah Kota Surabaya (Taman Baca Masyarakat (TBM), kegiatan Rakyat (Pertura), kegiatan pemeriksaan kesehatan lansia)
- Dengan alasan menentukan target : Mendukung operasional puspaga

19. Kegiatan Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft, Kegiatan masuk dalam klaster pendampingan, dengan kebutuhan dana Rp. 340.606.157,- output terdiri dari :

- Rumah yang dikelola sebanyak 1 bangunan.
- Operasional berupa pembayaran listrik, air, petugas keamanan dan kebersihan rumah kreatif handycraft selama 12 bulan
- Pemenuhan kebutuhan operasional dan peningkatan sarana prasarana rumah kreatif handycraft, antara lain Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Kebersihan, Alat Listrik dan Elektronik, Perlengkapan Komputer dan Printer, Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga,
- Pengadaan belanja modal di rumah kreatif handycraft berupa Pengadaan Alat Kantor dan Pengadaan Alat Rumah Tangga.
- Dengan alasan menentukan target : Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

20. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, kegiatan masuk dalam klaster Pengadaan/Penyediaan dan Pembayaran, dengan kebutuhan dana Rp.4.175.863.652,- outputnya terdiri dari:

- 100%
- Belanja bahan bacaan yaitu Koran (Surya, Radar Surabaya, Jawa Pos) : 3 jenis, jumlah bulan dalam TA 2020 : 12 kali, jumlah eksemplar dari tiap jenis bacaan (koran) : Surya dan Jawa Pos 8 eksemplar, Radar Surabaya 6 eksemplar
- Belanja Penjilidan sebanyak 50 buku
- Belanja air sebanyak 12 bulan
- Belanja Alat Tulis Kantor sebanyak 63 jenis
- Belanja bahan baku bangunan sebanyak 3 unit
- Belanja cetak sebanyak 5 jenis
- Belanja bahan kimia sebanyak 2 jenis
- Belanja perlengkapan kebersihan sebanyak 46 jenis
- Belanja bendera/umbul-umbul sebanyak 2 jenis
- Belanja jasa asistensi/pakar/praktisi sebanyak 2 jenis
- Belanja bahan makanan sebanyak 4 jenis
- Belanja materai sebanyak 2 jenis

- Belanja telepon 12 bulan
- Belanja listrik 12 bulan
- Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga sebanyak 5 jenis
- Belanja makanan dan minuman tamu sebanyak 2 jenis
- Belanja jasa tenaga operasional sebanyak 14 jenis

Dengan alasan:

Sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat daerah. Kebutuhan bahan bacaan menyesuaikan dengan jumlah struktural dan shelter

21. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran, kegiatan masuk dalam klaster Pengadaan/Penyediaan dan Pembayaran, dengan kebutuhan dana Rp.1.035.201.467,- outputnya terdiri dari:

- 100%
- Belanja modal pengadaan alat kantor sebanyak 5 jenis
- Belanja bahan bakar minyak/gas sebanyak 3 jenis
- Belanja kawat/faksimili/internet sebanyak 2 jenis
- Belanja modal pengadaan alat rumah tangga sebanyak 1 jenis
- Belanja modal pengadaan peralatan pemancar sebanyak 2 jenis
- Belanja pengisian tabung pemadam sebanyak 30 kilogram
- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah sebanyak 20 jenis
- Belanja alat listrik dan elektronik sebanyak 13 jenis
- Belanja pakaian kerja lapangan dan pelindung sebanyak 3 jenis
- Belanja modal pengadaan komputer dan perlengkapannya sebanyak 5 jenis
- Belanja pakai habis perlengkapan komputer sebanyak 18 jenis
- Belanja pakai habis perlengkapan kantor sebanyak 1 jenis
- Belanja pakai habis perlengkapan mesin, angkutan, dan alat berat sebanyak 1 jenis
- Belanja pemeliharaan pembangunan gedung sebanyak 3 jenis
- Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor sebanyak 1 jenis

Dengan alasan:

Kebutuhan operasional perangkat daerah. Usulan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pengadaan GPS pada mobil operasional beserta kelengkapannya.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kota Surabaya

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	3.401.835.288	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan		Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	2.775.850.683	
								Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsive gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%		
	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	147 lembaga	972.657.696	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	1.047.087.797	
	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	25 Kali	1.023.029.953	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29 Kali	1.327.475.402	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan	7 kali	584.788.510						
	Penyusunan profil gender dan evaluasi atas implementasi program pengarusutamaan gender	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	428.801.081	Penyusunan profil gender dan pengembangan evaluasi program pengarusutamaan gender	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	401.287.484	
	Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah peserta peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	1000 orang	392.558.048						
2	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66.86%	6.312.381.199	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	67.15%	4.640.702.736	
			Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	35%				Persentase kelurahan ramah anak	48%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%		
	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak	330 orang	1.818.716.535	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	Jumlah pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak	200 kasus	917.990.141	
	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 Lembaga	983.926.056	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 Lembaga	1.052.891.913	
	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A	Gedung Siola	Jumlah Peserta yang Mengikuti Capacity Building	926 orang	535.475.242	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A	Gedung Siola	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 peserta	528.711.761	
	Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	Jumlah kampung Inisiasi Kampung Arek Suroboyo yang dibina	154 kampung	772.626.828	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	Jumlah kampung Inisiasi Kampung Arek Suroboyo yang dibina	154 kampung	713.951.950	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Operasional Shelter	2 shelter Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya	2 bangunan	1.266.094.939	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. gayungsai barat XII GA-GB 15	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1.427.156.971	
	Operasional Tempat Penitipan Anak	Tempat penitipan anak rusun wonorejo	Jumlah tempat penitipan anak	1 lembaga	935.541.599						
3	Program Keluarga Berencana		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20.20%	9.362.300.265	Program Keluarga Berencana		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20.05%	7.945.614.245	
			Persentase peserta KB aktif	79.60%				Persentase peserta KB aktif	80.89%		
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	5.25%				Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4.95%		
			Persentase peserta KB baru	82.75%				Persentase peserta KB baru	83.55%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Saka Kencana	DP5A dan Gedung Olah Raga Pemkot Surabaya	Jumlah Pembinaan Saka Kencana	1 kali	219.018.057						
	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan	Jumlah peserta Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1740 orang	1.943.359.986	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan	jumlah peserta Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	1.251.582.273	
	Pembinaan Keluarga Berencana	31 Kecamatan	jumlah peserta pembinaan Keluarga Berencana	1718 orang	567.453.244						
	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas, dan Bakti Sosial Kecamatan	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	850 orang	1.306.454.526	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Rumah Sakit	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1.431.034.842	
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	2 unit	1.107.741.800	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	2 unit	1.143.636.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	jumlah kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	32 Lembaga	4.069.439.000	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	jumlah kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	3.894.200.000	
	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Kota Surabaya	jumlah profil pengendalian penduduk yang disusun	1 dokumen	148.833.652	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Kota Surabaya	jumlah profil pengendalian penduduk yang disusun	1 Dokumen	225.161.130	
4	Program Bina Keluarga		Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	92.89%	1.872.660.989						
			Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3.20%							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	31 Kecamatan	Jumlah orang peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi : 1350 orang	1350 orang	643.514.964						
	Pembinaan Keluarga Sejahtera	31 Kecamatan	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	1280 orang	594.233.377						
	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	PUSPAGA di Mall Pelayanan Publik	Jumlah Puspaga yang dielenggarakan operasionalnya	2 Lembaga	634.912.648						
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	4.405.091.937	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga		Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	4.426.767.221	
	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	Jumlah peserta yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	300 orang	2.073.304.548	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	Jumlah peserta inkubasi usaha mandiri	100 orang	1.304.280.603	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya, Luar Pulau	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	63 lembaga	1.921.271.661	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya, Luar Pulau	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	15 lembaga	1.022.476.666	
	Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Kota Surabaya	Jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri	12 Dokumen	410.515.728						
						Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain yang telah disepakati di Kota Surabaya	Jumlah orang peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi : 1350 orang	1350 orang	431.705.219	
						Pembinaan Keluarga Sejahtera	Surabaya	Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina	1240 orang	699.249.396	
						Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Mall pelayanan publik, Jl. Tunjungan no. 1-3 lantai 2 surabaya	Jumlah Puspaga yang dielenggarakan operasionalnya	2 lembaga	628.449.180	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jl. Klakah Rejo gang sampurna no.21 surabaya	Jumlah gedung dan bangunan yang dikelola	1 bangunan	340.606.157	
6	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	7%	720.460.210						
			Persentase rumah kreatif yang beroperasi	81.25%							
	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jalan Klakah Rejo RT.002/ RW.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo	Jumlah rumah kreatif yang dikelola	1 bangunan	482.588.459						
	Pembinaan Rumah Kreatif	Surabaya	Jumlah pelaku usaha kreatif di sekitar wilayah rumah kreatif	25 orang	237.871.751						
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	76%	4.235.682.778	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	78%	4.175.863.652	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.235.682.778	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jl. Kedungsari No.18 Surabaya	persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.175.863.652	
8	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	1.118.238.424	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	1.035.201.467	
	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	131 unit	1.118.238.424	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jl. Kedungsari No.18 Surabaya	jumlah sarana yang dipelihara dan diadakan	100%	1.035.201.467	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Forum Perangkat

Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeko. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah.

Forum perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menghasilkan saran dan masukan pada penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta penyelesaian permasalahan yang mendesak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masukan yang ada tidak berupa usulan program atau kegiatan, akan tetapi penajaman terhadap bentuk pelaksanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah disusun pada rancangan awal Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saran dan Masukan pada Forum Perangkat Daerah Diuraikan sebagai berikut:

1. Kristiningsih, SE., M. Si (Universitas Wijaya Kusuma) saran yang diberikan:
 - Pendampingan Inkubator Usaha Mandiri. a) Inkubator usaha mandiri tidak hanya diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga pada calon wirausahawan muda (ijazah SMA/ perguruan tinggi) untuk dapat mencreate usaha baru. Para instansi perguruan tinggi dan perusahaan swasta perlu digandeng untuk pendamping lulusan yang akan menjadi tenant inkubator usaha mandiri program CSR perusahaan swasta/BUMN juga dapat digunakan untuk mengcreate usaha mandiri. b) Kerjasama dengan

institusi yang dapat menjadi pendamping untuk inkubator usaha start up bussiness.

- Pengembangan Usaha Otonomi. a) Edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengelolaan usaha ekonomi mikro seperti pembuatan rencana bisnis, analisa untung rugi, dan pemasaran terpadu. b) Pelatihan untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif yang terjadi dan 14 sektor seperti jasa arsitektur, desain prodak, , fashion, desain interior, komunikasi visual, fotografi, penerbitan, periklanan, seni rupa, dan telensi. c) Menggali potensi yang terdapat di wilayah-wilayah.

2. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si (Universitas Wijaya Kusuma) saran yang diberikan:

- Program dan kegiatan dipastikan telah dievaluasi, sudah mencapai target (%) sehingga target kinerja 2020 adalah target kinerja yang memang merupakan hasil analisis.
- Perlu dicari ciri khas dari program dan kegiatan untuk menunjukkan kekhasan yang dapat jadi unggulan.
- Ada koordinasi dengan seluruh OPD yang terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terintegrasi.
- Revolusi industri 4.0. Teknologi dalam pendampingan keluarga dan anak bisa menjadi referensi untuk menambah wawasan.
- Ekonomi Surabaya dengan pendampingan untuk UKM harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Setiap OPD menyiapkan data terpilah laki-laki dan perempuan untuk perencanaan kegiatan.

3. Dra. Tri Soesantari, M.Si (FISIP Universitas Airlangga) saran yang diberikan:

- Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan memerlukan strategi yaitu PUG (pengarusutamaan gender) yang diwujudkan melalui 7 prasyarat. Dimana komitmen merupakan dasar utama untuk pelaksanaan kegiatan.

Surabaya sudah pernah mendapatkan penghargaan pada tingkat mentor dan akan tetap bisa mendapatkan penghargaan tersebut apabila memiliki payung hukum yang mengatur dan bentuk payung hukum yang tertinggi untuk tingkat daerah adalah Perda.

- Isu KKGIS sudah dilaksanakan. Kesetaraan dan keadilan gender dan inklusi sosial sudah ada di semua program DP5A dan sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan dan program, inklusi sosial yang responsive gender.
4. Anang K. (BPB dan LINMAS), saran yang diberikan:
- Terkait dengan permasalahan perlindungan anak. Permasalahan, Adanya kebebasan anak-anak di bawah usia 17 tahun yang sangat bebas mengakses internet/wifi di warung kopi. Solusi, Perlu menggandeng MUSPIKA untuk ikut sosialisasi dari wilayah agar ada batasan usia penggunaan wifi di warung kopi atau pihak pemilik dan penjaga warung kopi ikut mengawasi.
5. Fitri (Bagian Hukum), saran yang diberikan:
- Terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang ada kebijakan walikota hendaknya segera berkoordinasi dengan bagian hukum untuk di harmonisasi dengan peraturan perwalian yang lebih tinggi untuk selanjutnya disusun produk hukum daerah terkait kebijakan tersebut.
6. Endah Purnawirawanti (Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset), saran yang diberikan:
- Kegiatan pengelolaan tempat penitipan anak pada program perlindungan perempuan dan anak. Saran, menambah jumlah tempat penitipan anak karena banyaknya wanita pekerja.
 - Kegiatan pembinaan KB dan peyediaan pelayanan KB bagi keluarga pada program KB. Saran, agar pembinaan KB dan penyedia pelayanan KB bisa sampai ke warga lingkup RT/RW.
 - Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi dan pelatihan handycraft di rumah kreatif pada program peningkatan ketahanan keluarga. Saran, Agar menambahkan jumlah peserta dan lingkup

RT/RW bisa menerima informasi dengan jelas terkait kegiatan tersebut.

7. Suryananta Desy, S.H (Kejaksaan Negeri Tanjung Perak), saran yang diberikan:

- Pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak secara garis besarnya adalah program yang sangat bagus, namun dalam teknisnya perlu dilaksanakan dengan jelas dan terstruktur apa yang hendak dicapai dalam program ini. Hemat saya, pendampingan yang diberikan tidak saja diberikan kepada ABH/perempuan berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu disoroti adalah anak sebagai korban dan perempuan sebagai korban (tindak pidana) yang mana dalam proses berjalannya penyelesaian perkara. Anak/perempuan sebagai korban tindak pidana dewasa ini tidak didampingi. Tidak hanya untuk anak sebagai korban kekerasan tetapi juga bagi anak/perempuan sebagai korban pelecehan seksual/jenis tindak pidana lainnya yang dapat memengaruhi psikis anak dan pelecehan. Contoh: Pembunuhan. Dalam situasi sekarang ini diperlukan peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dalam masa pemulihan psikis.
- Dalam hal peningkatan ketahanan keluarga. Dinas dapat bekerjasama dengan lapas untuk membina warga binaan perempuan/anak dalam hal menciptakan kreasi usaha mandiri dan usaha ekonomi sehingga setelah perempuan dan anak keluar dari lapas, mereka sudah memiliki keahlian untuk mengembangkan usaha mandiri dan ekonomi kreatif.
- Dalam keterbatasan anggaran dan SDM, guna pendampingan terhadap anak dan perempuan dalam penanganan perkara, DP5A bisa gunakan statistik kriminal guna pendampingan yang lebih tepat dan efisien.

8. Surarti (POLRES Pelabuhan Tanjung Perak), saran yang diberikan:
- Dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dapatnya ditingkatkan pelatihan, sehingga perempuan mempunyai ketereampilan dan punya daya saing.
 - Buatlah aturan yang jelas dengan fungsi yang tegas berkaitan dengan tempat yang dimanfaatkan oleh remaja untuk cangkrukan seperti kopi giras yang tidak ada batas waktu operasi karena tempat seperti ini kadang digunakan untuk berjualan miras tersembunyi, banyak korban anak dari miras tersebut.
 - Pemkot melalui DP5A untuk tidak bosan untuk melatih penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga karena kejahatan, kenakalan anak berasal dari lemahnya ekonomi.
 - Tingkatkan penyuluhan kepada orang tua untuk tidak sibuk dengan gadget yang berpengaruh terhadap kurangnya perhatian kepada anak. Beberapa kasus kenakalan anak karena kurangnya perhatian dari orang tua.
9. Suwindayanti (Dinas Sosial Kota Surabaya). Saran yang diberikan:
- Perlunya sosialisasi KB kepada masyarakat kecil dan berpendidikan rendah. Karena masih banyak juga masyarakat yang belum memakai KB. Pada akhirnya mempunyai banyak anak dengan perekonomian kurang. Akhirnya mereka kebanyakan memperkerjakan anak-anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - Perlunya sosialisasi sejak dini juga bukan hanya mencegah mempunyai anak dipernikahan dini. Karena jika melakukan seks sejak dini dan belum cukup umur akan menimbulkan penyakit kanker serviks. Seks dini dibawah 17 tahun akan dapat mengakibatkan kanker serviks.
10. KOMZA BM (KODIM 0832/55), saran yang diberikan:
- Saran pembinaan anak terhadap ledakan penduduk. Lebih diaktifkan pembinaan dari anak jalanan yang kurang tersentuh dengan membentuk wadah dari anak jalanan terutama yang berasal dari keluarga prasejahtera. Koordinasi dengan DINSOS,

APKAM, LSM, dan Agama. Di dalam wadah tersebut diberikan pendidikan tentang sekolah, keagamaan, hukum, dan wawasan kebangsaan sehingga anak yang lahir akibat dari ledakan penduduk menjadi warga yang baik dan generasi produktif (Diberikan bekal keterampilan) dan tidak akan lupa akan basic keagamaan serta berwawasan kebangsaan.

11. Bambang J.A (Dinas Pendidikan Kota Surabaya), saran yang diberikan:

- Kerjasama kedepannya lebih baik lagi khususnya menangani anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.
- Pembekalan untuk anak yang tidak bersekolah dengan suatu keterampilan.

12. Dita Amalia (PLATO), saran yang diberikan:

- Membangun mekanisme kerja yang sinergis, sistematis, dan berkelanjutan.
- Mengembangkan program yang komprehensif dan berkesinambungan dengan menyatukan sistem rujukan antar bidang, OPD, stakeholder lainnya.
- Memperkuat program berbasis bukti terukur dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi (output, outcome, and goal) (pengembangan tools monev)

13. Achmad Sjafii (Koalisi Kependudukan Jawa Timur), saran yang diberikan:

- Pernikahan usia dini (PUD), diperlukan perda kota surabaya untuk pencegahan (PUD).
- Pekerja anak (PA), Koordinasi dengan disnaker dan dinas pendidikan membuat sekolahb alam yang mempunyai PA untuk kesempatan belajar.

14. Wahyu Setyaningsih (Dinas Kesehatan Surabaya), saran yang diberikan:

- Sebagai salah satu indikator kinerja kegiatan Des yaitu penyelenggaraan operasional shelter. Agar ditambahkan untuk shelter bumil/Ibu Hamil sebagai bentuk upaya membantu

percepatan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi di kota Surabaya

15. Tiara E.L (BAPPEKO), saran yang diberikan:

- Updating isu-isu terkait : - Pemberdayaan perempuan (Profil perempuan di kota Surabaya) sehingga tahu aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan kualitasnya oleh perempuan di kota Surabaya. - Masalah keluarga dan pengasuhan anak, problem anak muda, anak inklusi. - Kesetaraan permasalahan gender di kota Surabaya berdasarkan kewilayahan untuk menajamkan sasaran kegiatan masing-masing bidang, dapat dilaksanakan 1-2 kali dalam 1 tahun.
- Jumlah PUS unmet need yang belum menjadi akseptor , apakah strategi yang telah disusun untuk meningkatkan jumlah akseptor di klarifikasi ini. Terkait data KB, bisa direncanakan untuk koordinasi dengan Dinkes, supaya data yang dipakai selalu update dan sama (i data). Maksimal peran IMP dalam mendorong percepatan , peningkatan presentase/cakupan akseptor KB se-Surabaya.
- Review kembali dari seluruh keluarga miskin di tahun dasar, butuh berapa untuk mengangkat ekonomi keluarga (menjadi tidak miskin).
- Untuk forum PD berikutnya menampilkan data-data "minimum indikator" umum untuk urusan KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

16. Suharto Ahmad (Paguyuban KB Pria Pakal), saran yang diberikan:

- Program yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan DP5A sudah cukup baik dan banyak membantu masyarakat. Dibidang keluarga Berencana juga sangat baik, hasil perencanaannya pun cukup besar. Saran yang harus saya sampaikan: 1) DP5A hendaknya memberikan pelatihan untuk ibu-ibu yang suaminya telah mengikuti MOP. 2) Memberikan perhatian kepada pengurus kelompok KB pria di wilayah masing-masing terkait dengan baju seragam dengan maksud agar masyarakat tau dan lebih kenal dengan pengurus/Kelompok KB Pria. 3) Penyuluhan tentang efek samping dari MOP jangka panjangnya.

17. Agni Rahadyanti (Wahana Visi Indonesia), saran yang diberikan:

- Penguatan forum-forum anak yang ada di masyarakat. Tidak hanya cukup dan adanya SK Forum Anak di Kecamatan saja. Namun juga sampai ke monitoring. Akan lebih baik forum anak dibina mulai dari level kampung sampai kelurahan. Bagaimana forum anak yang aktif menjadi indikator KAS yang tidak berhenti pada proses penjurian semata.
- Untuk penguatan keluarga, fungsi-fungsi PUSPAGA yang sudah baik bisa diturunkan sampai ke bawah. Bagaimana pengasuhan positif bisa disosialisasikan pada lebih banyak masyarakat. Memperkuat PKBM dan SATGAS Perlindungan Anak dan Perempuan di kecamatan dan kelurahan untuk bisa ambil bagian dalam sosialisasi positif parenting ke orang tua. Adanya TOT fasilitator yang dimulai dari PKBM/SATGAS dan terus diperluas sehingga semakin banyak orang tua yang terpapar untuk melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan yang aman dimulai dari keluarga sebagai upaya preventif.
- Penguatan monitoring dan implementasi kegiatan dan pengembangan minat bakat anak sehingga menurunkan potensi anak terseret lingkungan negatif sekitar dan menguatkan anak-anak yang sudah "baik" tidak kembali ke lingkungan negatif.
- Adanya evaluasi dan monitoring bersama atas implementasi program yang sudah berjalan.

18. Norma Hidayat (Satpol PP), saran yang diberikan:

- Untuk pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak di Surabaya sudah sangat baik. Dari Satpol ada masukan untuk penanganan anak yang luar Surabaya sebaiknya juga di outreach supaya nantinya kalau ada warga dari luar sudah ada rekam data. Jadi tidak hanya dikirim di Liponsos, karena ini nanti akan menjadi nilai tersendiri bagi kota Surabaya yang peduli terhadap anak tidak hanya anak Surabaya yang bermasalah tetapi mencakup anak manusia. Selain itu DP5A, khusus untuk anak bermasalah dari luar kota untuk di laporkan

lewat media sosial seperti E100 atau instagram supaya yang tidak kembali/meninggalkan dari rumah bisa bertemu keluarganya kembali. Ini menjadi nilai tersendiri bagi DP5A. Yang kedua Kota Surabaya khususnya DP5A dan Satpol PP tidak bermasalah dengan hukum terkaitannya dengan anak di bawah umur yang perlu pendampingan.

19. Agus Farizal (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya), saran yang diberikan:

- Terkait kegiatan pembinaan pengembangan kampung arek Surabaya, perlu difasilitasi dengan perpustakaan kampung (yang dikelola oleh dinas perpustakaan dan kearsipan) untuk menunjang kreatifitas anak-anak Surabaya sehingga kampung arek Suroboyo yang berkualitas tercapai dan menunjang ilmu pendidikan anak-anak yang memadahi.
- Terkait penyelenggaraan operasional PUSPAGA, DP5A perlu mensosialisasikan ke warga kota Surabaya bagar peran serta PUSPAGA sangat membantu anak-anak kota Surabaya dalam mengembangkan peran serta kreatifitas anak untuk mengoptimalkan kreatifitas anak di dalam masyarakat khususnya pada anak berkebutuhan khusus.

20. Teguh A. (Dinas Perdagangan Kota Surabaya), saran yang diberikan:

- Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk UMKM Binaan DP5A supaya diarahkan untuk pendaftaran merk dan halal di Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
- Untuk memperluas pemasaran produk UMKIY Binaan DP5A, bisa dipasarkan di Sentra UMKM di sentra UMKM Siola, Meer, Kebun Binatang Surabaya, Jembatan Merah Plaza Surabaya, Delta Mall Surabaya, Pelabuhan, Park and Ride.

21. Suparno (KODIM 0832), saran yang diberikan:

- Tentang pembinaan keluarga berencana. - Mohon izin menyarankan agar dalam pembinaan KB perlu adanya sosialisasi KB kepada kaum muda-mudi agar menjadi bekal tentang pentingnya keluarga berencana. -Terkait dengan KB MOP perlu

adanya sosialisasi yang lebih agar semua tidak merasa ragu karena selama ini suami yang mau mengikuti KB MOP rata-rata masih kurang mengenali hal tersebut. -Perlu adanya kader KB MOP.

- Terkait daya Saka Kencana. - Dalam rangka mendukung Saka Kencana kami KODIM 0832 berharap bisa bekerjasama dengan kami khususnya pemberian materi dalam pelaksanaan di saka kita laksanakan materi KB dan Kodim akan memberikan materi ke Saka Kencana tentang wawasan kebangsaan dan bela negara.

22. Andie L. (Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya), saran yang diberikan:

- Perlu dianggarkan untuk kontrasepsi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu secara gratis untuk mendukung program pemerintah guna mengurangi anak/jumlah penduduk.
- Menambahkan tempat untuk penitipan produk-produk yang dibuat warga supaya mendapatkan tambahan pemasukan ekonomi warga.
- Perlu menambahkan pelatihan-pelatihan selain pelatihan handycraft secara gratis.
- Perlu diadakan sosialisasi bagi anak dan para remaja misal tentang narkoba, pernikahan dini, wawasan tentang remaja.
- Perlu ada lomba-lomba di kampung tentang kampung anak, kampung lansia, usaha mandiri, kampung gender, senam lansia, penanganan lansia.

2.5.2. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, Klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten/kota Bappeda mengajukan rancangan RKPD kabupaten/kota kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD kabupaten/kota. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;

2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
3. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota;
4. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
5. Sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota. Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD provinsi dan pejabat PD kabupaten/kota atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota. Hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

2.5.3. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mulai Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak boleh melaksanakan pelatihan keterampilan, maka usulan kegiatan masyarakat yang masuk akan diarahkan atau disinergikan dengan kegiatan pahlawan ekonomi.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Surabaya

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sampai dengan terpilihnya pemerintah yang baru hasil Pemilihan Presiden.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan berkualitas”. Tema tersebut dijabarkan dalam 5 Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- d. Pengelolaan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Prioritas Nasional RKP 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pada prioritas nasional ke-1 yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Perioritas nasional ke-1 Pembangunan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar memiliki beberapa program prioritas yaitu:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
5. Peningkatan tata kelola layanan dasar

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2016-2021 **“Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat”** dijabarkan menjadi beberapa Misi, dari masing-masing misi dapat dicapai dengan beberapa tujuan. Perumusan tujuan strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya didapatkan dengan cara menyingkronkan tujuan strategis pembangunan kota yang sesuai dengan pelayanan PERANGKAT DAERAH dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Tujuan Strategis Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak karena Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada keluarga serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga;

2. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar karena Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas.

Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dicapai melalui sasaran strategis Renja Perangkat Daerah, masing-masing tujuan memiliki satu atau beberapa sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis Renja Perangkat Daerah, sasaran strategis dari masing-masing tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, memiliki sasaran strategi :
 - a. Meningkatkan akses partisipasi control, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pembangunan
 - b. Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking
 - c. Meningkatkan kualitas layanan KB dasar
2. Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki sasaran strategi : Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan:
 - a. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
 - b. Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan
 - c. Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya
2. Program perlindungan perempuan dan anak, dengan kegiatan:
 - a. Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
 - b. Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
 - c. Capacity Bulding bagi Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo
 - e. Penyelenggaraan Operasional Shelter
3. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan terhadap Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
 - b. Pembinaan Keluarga Sejahtera
 - c. Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA
 - d. Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri
 - e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
 - f. Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft

4. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
 - b. Penyedia Pelayanan KB bagi Keluarga
 - c. Penyedia Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
 - d. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)
 - e. Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya tahun 2016-2021 dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 khususnya Misi Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan Misi Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
2. Program dan kegiatan harus selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah
3. Program dan kegiatan harus selaras dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Kota Surabaya

4. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019
5. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pembedayaan masyarakat.
7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai hasil program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi meningkatnya biaya kebutuhan hidup.
8. Berita Acara Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada 18 Februari 2019 mengenai konsep perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang menjadi bahan penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadi Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan tahun 2020, isu-isu dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Adanya kewenangan untuk terwujud keluarga yang berkualitas
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program
4. melaksanakan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sehingga
5. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak tertangani dengan baik

Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang sebagian adalah menjadi urusan yang sesuai dengan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2020, rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun berdasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran terdiri dari 6 Program, 28 Kegiatan. Program dan Kegiatan diuraikan secara detail pada Tabel T-C 33 Tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Surabaya

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				Usuran Pemerintahan								
1	1			Usuran Wajib								
1	1	2		Non Pelayanan Dasar								
1	1	2.02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7.416.553.419	APBD	-		7.504.625.188	
1	1	2.02.01		Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi		100%	2.775.850.683	APBD	-	100%	2.801.368.251
1	1	2.02.01	1	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola Surabaya	289 lembaga	1.047.087.797	APBD	-	289 lembaga	1.056.713.363
1	1	2.02.01	2	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	Surabaya	29 kali	1.327.475.402	APBD	-	29 kali	1.339.678.488

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	2.02.01	7	Penyusunan profil gender dan evaluasi atas implementasi pengarusutamaan gender di kota surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	Surabaya	2 dokumen	401.287.484	APBD	-	2 dokumen	404.976.400
1	1	2.02.02		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)		67.15%	4.640.702.736	APBD	-	74.98%	4.703.256.937
					Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak		48%	-	-	-	100%	
					Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani		100%	-	-	-	100%	
1	1	2.02.02	1	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	jumlah pendampingan dan pembinaan penanganan permasalahan perempuan dan anak 330 kasus	Kota Surabaya	200 kasus	917.990.141	APBD	-	200 kasus	930.364.159

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	2.02.02	2	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	Kota Surabaya	431 lembaga	1.052.891.913	APBD	-	431 lembaga	1.067.084.335
1	1	2.02.02	3	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	Gedung Siola	926 orang	528.711.761	APBD	-	926 orang	535.838.514
1	1	2.02.02	4	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	154 kampung	713.951.950	APBD	-	154 kampung	723.575.642
1	1	2.02.02	37	Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. gayung sai barat XII GA-GB 15	2 lembaga	1.427.156.971	APBD	-	2 lembaga	1.446.394.287
1	1	2.08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				12.031.775.309	APBD	-		12.175.111.552

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	2.08.01		Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)		20.05%	7.945.614.245	APBD	-	19.95%	8.030.137.258
					Persentase peserta KB aktif		80.89%				84.35%	
					Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi		4.95%				4.90%	
					Persentase peserta KB baru		83.55%				80.95%	
1	1	2.08.01	2	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	jumlah orang yang mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan	2208 orang	1.251.582.273	APBD	-	2208 orang	1.264.896.222
1	1	2.08.01	4	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	650 orang	1.431.034.842	APBD	-	650 orang	1.446.257.753

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	2.08.01	5	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	2 unit	1.143.636.000	APBD	-	2 unit	1.155.801.650
1	1	2.08.01	7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	31 lembaga	3.894.200.000	APBD	-	31 lembaga	3.935.625.308
1	1	2.08.01	8	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	jumlah profil pengendalian penduduk yang disusun	Kota Surabaya	1 Dokumen	225.161.130	APBD	-	1 Dokumen	227.556.325
1	1	2.08.02		Program Bina Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif		100%	1.759.403.795	APBD	-	100%	1.784.727.348
					Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun		3.10%				10.33%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	2.08.02	1	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain yang telah disepakati di Kota Surabaya	1350 orang	431.705.219	APBD	-	1350 orang	437.918.864
1	1	2.08.02	2	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	Surabaya	1240 orang	699.249.396	APBD	-	1240 orang	709.313.873
1	1	2.08.02	3	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	Mall pelayanan publik, Jl.Tunjungan no 1-3 lantai 2 surabaya	2 lembaga	628.449.180	APBD	-	2 lembaga	637.494.611
1	1	2.08.03		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi		75%	2.326.757.269	APBD	-	75%	2.360.246.946
1	1	2.08.03	2	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan inkubasi usaha mandiri	Surabaya	100 orang	1.304.280.603	APBD	-	300 orang	1.323.053.450

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	1	2.08.03	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya, Luar Pulau	15 lembaga	1.022.476.666	APBD	-	63 lembaga	1.037.193.496
1	2			Urusan Pilihan								
1	2	2		Non Pelayanan Dasar								
1	2	2.02		Pariwisata				340.606.157	APBD	-		345.508.589
1	2	2.02.04		Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft		8%	340.606.157	APBD	-	8%	345.508.589
					Persentase rumah kreatif yang beroperasi		100%				100%	
1	2	2.02.04	1	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	Jl. Klakah Rejo gang sampurna no. 21 surabaya	1 bangunan	340.606.157	APBD	-	1 bangunan	345.508.589
2				Penunjang Urusan Pemerintahan								
2	2			Unsur Manajemen								
2	2	2		Non Pelayanan Dasar								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Recana Tahun 2020 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2	2	2.02		Sarana dan Prasarana Perkantoran				5.211.065.119	APBD	-		5.293.367.891	
2	2	2.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran			78%	4.175.863.652	APBD	-	78%	4.242.274.146
2	2	2.02.01	6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	4.175.863.652	APBD	-	100%	4.242.274.146	
2	2	2.02.02		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100%	1.035.201.467	APBD	-	100%	1.051.093.745	
2	2	2.02.02	6	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	1.035.201.467	APBD	-	121 unit	1.051.093.745	
								TOTAL	25.000.000.004				25.318.613.220

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya serta visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada khususnya sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Surabaya

The image shows a circular official stamp of the Surabaya City Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA SURABAYA'. The inner circle contains the text 'DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

CHANDRA RATNA MARIA DE ROSARIO ORATMANGUN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
196010061995032001